



**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Rusak, Aset Pemkab Segera Direnovasi

**KOTA MANNA** - Pemkab Bengkulu Selatan (BS) memastikan merenovasi bangunan berupa kolam renang dan lapangan tenis milik pemerintah daerah, sebab bangun itu direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga agar ada kontribusi pada daerah.

Kondisi aset pemerintah daerah Kabupaten BS semakin memprihatinkan, seperti halnya bangunan hotel Duta Beach, kolam renang dan lapangan tenis yang berada di kawasan wisata Pasar Bawah. Tiga aset Pemkab BS tersebut terpaksa harus terbengkalai sejak beberapa tahun terakhir.

Bangunan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu terpaksa dibiarkan hingga tak lagi beroperasi. Penyebabnya tak lain dikarenakan kondisinya yang tak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan sebagai aset andalan.

Maka dari itu, tahun 2023 ini pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran perbaikan untuk hotel DUTA Beach, kolam renang dan lapangan tenis. Namun meski sudah merencanakan untuk perbaikan, Pemkab BS juga berharap ada dukungan penuh

dari legislatif untuk proses penganggaran.

Sebab menurut Wakil Bupati BS Rifa'i Tajuddin, saat ini kondisi keuangan mulai stabil, apalagi pandemic covid-19 sudah melandai dan tak ada lagi goncangan, sehingga anggaran untuk perbaikan bisa disiapkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, jika nanti proses renovasi aset tersebut tuntas dilakukan, maka Pemkab BS siap untuk menyerahkan bangunan itu kepada pihak ketiga. Dan pihak ketiga yang dipercaya wajib untuk melakukan bagi hasil dari omset aset tersebut.

"Bisa dilakukan perbaikan, tapi tidak bisa langsung tahun ini, makanya pemerintah daerah rencanakan tahun depan. Mudah-mudahan bisa dan keuangan daerah juga mulai membaik," kata Wabup.

Sementara itu, dari data terhim-pun setidaknya pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran perbaikan hingga Rp 3 miliar. Sebab kondisi aset itu sudah tak lagi berfungsi sejak beberapa tahun lalu. **(tek)**